

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun

Yeah, reviewing a book **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun** could increase your near associates listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, capability does not recommend that you have astonishing points.

Comprehending as competently as contract even more than additional will offer each success. adjacent to, the proclamation as without difficulty as keenness of this Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun can be taken as capably as picked to act.

*Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Akhir Tahun*

*Downloaded from
blucommerce.com by
guest*

COMPTON BRYCE

KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA DI INDONESIA UNITOMO PRESS

Buku Persembahan dari Penerbit VisiMedia Pustaka ini dilengkapi Sejarah Undang-Undang tentang Desa dan Bagan tentang Pengaturan Desa Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan

Keputusan Musyawarah Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 #UndangUndang #UndangUndangDesa #Peraturan #PeraturanPemerintah #PeraturanMenteri #PeraturanMenteriDesa #Desa #PemerintahanDesa #KepalaDesa #PerangkatDesa #PeraturanDesa #PengaturanDesa #DanaDesa #APBDesa #SKBTigaMenteri #MusyawarahDesa #PendampinganDesa #BUMD #SejarahUndangUndangDesa #DesaMandiri #EkonomiDesa *Memanusiakkan Manusia* Bumi Aksara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan TerkaitVisiMedia

Regulasi Desa Bumi Aksara

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, desa perlu dilindungi dan diberdayakan. Tujuannya agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan perlindungan hukum sekaligus mengatur berbagai hal mengenai desa, mulai dari kewenangan, pembangunan, badan usaha milik desa, hingga perihal dana desa. Mengenai dana desa dan alokasinya juga dibahas secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan perubahan-perubahannya. Semua itu dirangkum secara detail dalam buku ini. Nah, segera baca buku ini supaya Anda dapat mendalami berbagai hal mengenai desa dan dana desa. Kemudian, bantu wujudkan harapan pemerintah dalam menciptakan desa sebagai elemen yang lebih kuat untuk pembangunan Indonesia menjadi negara yang maju! Selamat membaca!

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait Nas Media Pustaka

Desa mengalami pergeseran kedudukan, peran dan tata kelola seiring berubahnya kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Desa pernah berkedudukan sebagai daerah otonom tingkat III dan saat ini kembali menjadi bagian dari Daerah Kabupaten/Kota. Peran dan tata kelola pemerintahan desa yang dahulu lebih dominan berperan sebagai perpanjangan tangan dan bagian dari pemerintah daerah telah

bergeser karena mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan hak tradisionalnya, sebagaimana yang dimandatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi local self government dan self-governing community, Desa mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan memajukan adat, tradisi, dan budaya yang telah hidup pada masyarakat desa. Kewenangan desa sebagaimana dimaksud mencakup kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan berbagai kewenangan tersebut dapat dikuatkan dengan penetapan produk hukum desa (Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa).

Gramedia Widiasarana Indonesia
Buku ini menggambarkan Sistem dan Prosedur Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014.

Dana Desa Menuju Kedaulatan Gampong Bumi Aksara

Buku sejarah 110 Tahun Rempung (Sejarah dan Kepemimpinan di Desa Rempung) terlahir dari sebuah tujuan untuk mengenang sejarah Desa Rempung dan mengingatkan kembali akan sejarah panjang perjalanan desa rempung sehingga sampai saat ini diusia

110 tahun. Usia 110 tahun bukan usia muda jika dikaitkan dengan seorang manusia. Usia 110 merupakan usia yang sangat sepuh, sehingga perlu diabadikan dengan tulisan-tulisan dan dokumen sebagai sejarah untuk anak cucu kita kelak ke depan.

Strategizing Indigenous Knowledge and Institutions for Poverty Reduction and Sustainable Community Development in Indonesia Springer

Kata-kata kunci dari buku ini adalah “partisipasi, pemberdayaan, kepemimpinan dan memanusiakan manusia”. Kata-kata kunci tersebut didiskusikan bersamaan pada saat membahas metode appraisal desa secara partisipatif, metode pengembangan organisasi yang apresiatif, metode perencanaan program aksi secara logis dan ber-basis hak azasi manusia dan perencanaan strategis program aksi jangka menengah. Penerapan prinsip memanusiakan manusia dalam payung kepemimpinan “ketundukan” adalah pesan utama yang ingin disampaikan penulis Himpunan Peraturan Lengkap tentang Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Pelaporan, hingga Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait Commentary on the Indonesian law on local government with reference to adat law of Sumatera Selatan people.

Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Bumdes : pembentukan dan pengelolaannya
suatu telaah administrasi negara
Bumi Aksara

Keberadaan perusahaan penambangan emas oleh PT Newmont Nusa Tenggara menjadikan Kabupaten Sumbawa Barat salah satu kabupaten penting di Provinsi

Nusa Tenggara Barat. Keberadaannya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kontribusi PT Newmont Nusa Tenggara memberikan dampak tertinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Nusa Tenggara Barat sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak positif terhadap perkembangan desa di wilayah yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberadaan perusahaan pertambangan emas tersebut. Penyebab kemiskinan di perdesaan, terutama di kawasan pertambangan emas karena ketidakberdayaan. Kondisi itu disebabkan minimnya akses informasi dan komunikasi masyarakat miskin terhadap pemerintah daerah dan perusahaan pertambangan emas PT Newmont Nusa Tenggara. Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan, salah satunya dengan memaksimalkan otonomi desa. Salah satu bentuk kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan adalah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam buku ini akan dibahas peranan BUMDes di perdesaan kawasan pertambangan emas. Selain itu, juga akan dibahas kelebihan dan kelemahan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penerbit LeutikaPrio

Revisi RPJMA untuk Rasionalisasi Target Pencapaian target adalah variabel terpenting dalam pembangunan. Penetapan target-target ini, sebagaimana termaktub dalam struktur dokumen perencanaan mulai dari RPJP, RPJMA, hingga Rencana Kerja (Renja), adalah proyeksi keberhasilan

pembangunan yang harus diupayakan tercapai oleh SKPA sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sebagai proyeksi yang inheren dalam proses perencanaan pembangunan, maka tentu target-target pembangunan ini ditetapkan sebagai gambaran ideal. Ia menjadi ideal untuk dicapai dan diwujudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berhasil membawa perubahan atau kemajuan ke arah yang lebih baik. Namun tentu dinamika pembangunan pada kenyataannya sering membawa implikasi perlunya langkah-langkah penyesuaian terhadap target-target capaian ini agar lebih achievable. Inilah dasar pikir perlunya dilakukan revisi terhadap target-target pembangunan Aceh sebagaimana termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (2012-2017) dan yang tertera dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2013. Ini adalah proses yang normal dan menjadi bagian dari evaluasi tahunan terhadap pencapaian target RPJMA. Ketika dinilai tidak mencapai target, maka perlu dievaluasi untuk dikaji ulang dan direvisi dengan target dan angka-angka yang lebih realistis tentu dengan melihat dan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang kita miliki. Revisi RPJMA Aceh (2012-2017) di sisi lain sesungguhnya juga tidak dapat dipisahkan dari transisi pemerintahan di tingkat nasional yang kemudian melahirkan program atau kebijakan pembangunan baru yang menuntut penyesuaian di tingkat daerah-daerah. Jika kita bicara dasar hukum, maka langkah revisi ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah. Pada tahap selanjutnya hasil revisi akan disepakati bersama-sama antara eksekutif dan legislatif untuk kemudian ditetapkan dengan qanun.

Teori, Praktik, dan Permasalahan

Tabloid Tabangun Aceh

A NEW YORK TIMES BESTSELLER An Esquire Best Book of 2017 Remember when presidents spoke in complete sentences instead of in unhinged tweets? Former Obama speechwriter David Litt does. In his comic, coming-of-age memoir, he takes us back to the Obama years – and charts a path forward in the age of Trump. More than any other presidency, Barack Obama’s eight years in the White House were defined by young people – twenty-somethings who didn’t have much experience in politics (or anything else, for that matter), yet suddenly found themselves in the most high-stakes office building on earth. David Litt was one of those twenty-somethings. After graduating from college in 2008, he went straight to the Obama campaign. In 2011, he became one of the youngest White House speechwriters in history. Until leaving the White House in 2016, he wrote on topics from healthcare to climate change to criminal justice reform. As President Obama’s go-to comedy writer, he also took the lead on the White House Correspondents’ Dinner, the so-called “State of the Union of jokes.” Now, in this refreshingly honest memoir, Litt brings us inside Obamaworld. With a humorists’ eye for detail, he describes what it’s like to accidentally trigger an international incident or nearly set a president’s hair aflame. He answers questions you never knew you had: Which White House men’s room is the classiest? What do you do when the commander in chief

gets your name wrong? Where should you never, under any circumstances, change clothes on Air Force One? With nearly a decade of stories to tell, Litt makes clear that politics is completely, hopelessly absurd. But it's also important. For all the moments of chaos, frustration, and yes, disillusionment, Litt remains a believer in the words that first drew him to the Obama campaign: "People who love this country can change it." In telling his own story, Litt sheds fresh light on his former boss's legacy. And he argues that, despite the current political climate, the politics championed by Barack Obama will outlive the presidency of Donald Trump. Full of hilarious stories and told in a truly original voice, Thanks, Obama is an exciting debut about what it means - personally, professionally, and politically - to grow up.

Penerbit Lakeisha

Buku ini berisi mengenai regulasi yang ada di desa. Regulasi desa dalam berbagai jenis dan bentuknya sangat diperlukan keberadaannya dalam proses dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa dengan segenap kewenangannya baik yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Desa memang bukan lagi sebagai tingkatan pemerintahan atau wilayah terendah di bawah Kabupaten Kota dan sudah ditetapkan kewenangannya melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun demikian Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dan berpemerintahan, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan seluruh kewenangannya hendaknya tetap taat asas dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapannya penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan

kepentingan masyarakat setempat benar-benar berjalan secara profesional, efisien, efektif, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Manajemen Keuangan Desa Bagian

1: Konsep Dasar Media Sains Indonesia
Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan Permendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.

ISU KONTEMPORER AKUNTANSI

PUBLIK Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai hasil riset dengan tiga isu akuntansi publik yaitu isu akuntansi pemerintah daerah, isu organisasi publik (nirlaba), dan isu akuntansi bumdes. Dari ketiga isu tersebut menjadi 21 sub judul yang menarik untuk dibaca. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah literatur bagi yang berminat mendalami dan meneliti ilmu akuntansi (sektor) publik. Sebuah peristiwa penting yang menjadi milestone perkembangan Akuntansi Publik terjadi di FEB UGM pada tanggal, 1 Desember 2018 yaitu perubahan nama dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) menjadi Akuntansi Publik (AP) pada acara Workshop Akuntansi Publik “Posisi dan Teori Dasarnya” yang dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai PTN/PTS se Indonesia. Penyebutan kata “sektor” menempatkan akuntansi untuk organisasi nirlaba ini sebagai subordinat atau cabang dari akuntansi yang lebih besar, dalam hal ini adalah akuntansi untuk organisasi bisnis. Oleh karena itu penggunaan kata yang tepat adalah Akuntansi Publik (tanpa sector). Akuntansi Publik adalah akuntansi yang memiliki hulu sendiri yang terpisah dari hulu Akuntansi Bisnis. Beberapa argument yang mendukung diantaranya: adanya perbedaan latar belakang pembentukan organisasi, tujuan pendirian organisasi dan cara pencapaian tujuan organisasi, serta sumber dan sifat pendanaan organisasi. Perbedaan-perbedaan ini memberikan konsekuensi perbedaan yang signifikan di antara kedua dunia akuntansi tersebut pada aspek perencanaan dan penganggaran, sistem pelaporan keuangan (akuntansi keuangan), maupun akuntansi manajemen.

Dengan di terbitkannya buku ini, kami penyunting mengucapkan banyak terima- kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi dalam buku ini dan juga penerbit yang telah membantu proses penerbitan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pembelajaran, pengembangan, pemahaman, dan menjadi inspirasi untuk terbitnya buku-buku berikutnya.

Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa Kencana

Kepala desa dipilih dan dipercaya oleh masyarakat untuk mengembangkan desa yang dipimpinnya. Kualitas kinerja kepala desa akan sangat menentukan kualitas hasil pembangunan, karena kepala desa merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Untuk itu, kepala desa dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien sehingga harapan serta cita-cita masyarakat desa bisa tercapai.

Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa CV. Social Politic Genius (SIGn)

Manajemen keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan keuangan desa. Hal-hal yang dibahas meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dinilai dengan uang dengan periodisasi satu tahun anggaran. Buku ini adalah bagian pertama dari Seri Buku Manajemen Keuangan Desa yang disusun untuk memberikan pengetahuan dasar terkait manajemen/pengelolaan keuangan desa. Pada bagian ini, bab yang dibahas adalah konsep dasar manajemen keuangan desa. Bagian selanjutnya dapat ditemukan padaseri buku bagian kedua dan ketiga.

Metamorfosis Desa di Kabupaten Karawang (Potensi Desa yang Tersembunyi) SCOPINDO MEDIA PUSTAKA

Perkembangan ilmu hukum modern menunjukkan bahwa perbedaan antara sistem civil law dan common law lambat laun menjadi samar. Hukum tertulis disebut-sebut sebagai bagian tak terpisahkan dari perkembangan hukum modern, sebab salah satu manfaat praktis dari hukum tertulis yakni bentuknya yang mudah diverifikasi. Dengan tidak menafikan kekurangannya, tak dapat disangkal bahwa keberadaan hukum tertulis dalam peradaban negara hukum modern telah mendapat tempat yang cukup populer, tak terkecuali di negara Indonesia, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 22A UUD NRI 1945. Dinamika perubahan seputar masalah pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satu musababnya yakni dipengaruhi oleh adanya kewenangan baru yang dimiliki oleh beberapa lembaga negara yang diatribusikan oleh undang-undang. Sebut saja misalnya lembaga DPD, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat kedudukan DPD dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut pada intinya menekan pada fungsi penguatan legislasi DPD yang harus dipandang sejajar dengan DPR dan Presiden, baik dalam pengajuan RUU, Pembahasan RUU, Penyetujuan RUU, Penyusunan Prolegnas, ataupun pemberian pertimbangan terhadap RUU. Buku ini terdiri dari VI (enam) bab dan lampiran-lampiran. Bab I menguraikan tentang Pendahuluan; Bab II menguraikan tentang Ilmu Perundang-Undangan; Bab III menguraikan tentang Lembaga-Lembaga Pembentuk Peraturan

Perundang-undangan di Indonesia; Bab IV menguraikan tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan; Bab V menguraikan tentang Asas-asas, Bahasa, Naskah Akademik, dan Kerangka Peraturan Perundang-Undangan; dan Bab VI menguraikan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam tiap-tiap Bab tersebut, dibuat subbab-subbab yang menguraikan lebih rinci dari judul tiap-tiap Bab.

ISU KONTEMPORER AKUNTANSI PUBLIK WiKeupedia

Setiap kepala desa adalah pemimpin tertinggi di desanya. Setiap kepemimpinan seorang kepala desa akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kepala desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah sehingga dibutuhkan sosok yang tepat untuk amanah tersebut. Buku ini hadir membahas teori dan implementasi mengenai kepemimpinan desa dan kedudukan kepala desa dalam kepemimpinan pemerintahan Indonesia; kepemimpinan desa di Indonesia; potret kepemimpinan desa yang berhasil di Indonesia; makna dan jenis pemilihan kepala desa; pedoman untuk memilih, calon kepala desa, panitia pemilihan kepala desa, dan kepala desa terpilih; dinamika pemilihan kepala desa di Indonesia; dan petunjuk teknis pemilihan kepala desa di Indonesia. Selain sebagai referensi bagi akademisi, buku ini juga sangat relevan sebagai pegangan para praktisi pemerintahan desa. Selamat membaca dan semangat memahami kepemimpinan kepala desa di Indonesia. Manfaat Dana Desa di Provinsi Riau

HarperCollins

Setiap entitas, tak terkecuali pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan pemda sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keunikan LKPD dibandingkan laporan keuangan entitas lainnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Teori, Praktik, dan Permasalahan diharapkan dapat

berperan sebagai preliminary warning bagi para pemangku kepentingan sebagai bagian dalam membuat sistem pengendalian intern yang memadai dan dapat meminimalkan penyimpangan. Terdiri atas 16 bab yang membahas akun-akun pada LKPD, buku ini memaparkan praktik terbaik dan risiko-risiko dari praktik tata kelola yang berlangsung sekarang. Buku ini patut dibaca oleh para mahasiswa, akademisi, pejabat dan aparat pemda, satuan inspektorat dan audit, anggota legislatif, serta para pemerhati tata kelola.